

**NASKAH AKADEMIK**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNA JALAN YANG  
MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS DIKIBATKAN OLEH  
JALAN YANG RUSAK**



**Disusun Oleh:**

**I WAYAN EKA ARTAJAYA**

**N P M : 09 05 10032**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN****NASKAH AKADEMIK****PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN YANG  
MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS DIAKIBATKAN OLEH  
JALAN YANG RUSAK****Disusun Oleh:****I WAYAN EKA ARTAJAYA****N P M****: 09 05 10032****Program Studi****: Ilmu Hukum****Program Kekhususan****: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum****Telah Disetujui****Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20-juni-2014****Dosen Pembimbing,****DR. G. Widiartana, SH.,M.Hum.**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS DIAKIBATKAN OLEH JALAN YANG RUSAK**

### **ABSTRAKS**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh jalan yang rusak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan yang rusak, dimana kecelakaan tersebut sering menimpa para pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Aturan-aturan hukum apakah yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan, dan apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: aturan-aturan hukum apakah yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusaknya jalan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan , dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan adalah kurangnya jumlah anggota kepolisian, fasilitas kepolisian dalam menunjang kerja aparat kepolisian yang kurang, dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak masih rendah.

Keywords: perlindungan hukum, pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas, jalan rusak.

## ABSTRAKS

The main topic of this thesis, the author discusses the legal protection for people who experienced a traffic accident caused by damaged roads. Background of this research based on the traffic accident caused by damaged roads, where the accident often happened to all the people especially when they used motorcycle. Main issues in this research are, the rules of law are might be used to provide legal protection against people had an accident that becomes from the damaged road, and the factor that becoming an obstacle to provide legal protection for traffic accident victims. Method approach in this research used normative law, this research focused on norms law and secondary data as the main databank and used primary data for support it. Data sources in this research is reached by literature review and field studies. Both data is process by using qualitative analysis. By virtue of analysis that has been done by the author, so inconclusive as follows: rules of law provide legal protection against road users had an accident by damaged road is “ Undang-Undang Dasar 1945 ”, And “ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ” about traffic and public transport, and constraints in providing legal protection for victims of traffic accidents was the lack number members of the police, less number of facilities that supporting the police activity , and low of awareness by victims to inform the accident for legal protection by the government.

Keyword : legal protection, road users, traffic accident, damaged roads

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini sering terlihat banyak kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Banyaknya kendaraan ini terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Soekanto soerjono, SH,MA, 1990, *Polisi dan lalu lintas* , cv.mandar maju, bandung,hlm 1.

pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik. Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal di permukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlobang (*pothole*). Kerusakan jalan tersebut tidak hanya berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering dijumpai hampir dari bibir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Kerusakan jalan seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, akibat roda kendaraan berat yang lalu lalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, kesalahan pada waktu pengaspalan, meningkatnya jumlah penduduk, umur jalan yang sudah tua dan juga akibat kesalahan perencanaan perhitungan pada saat pembuatan jalan. Pembuatan jalan yang tidak memperhitungkan daya tahan akan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kerusakan jalan. Kerusakan jalan di banyak tempat akan menyebabkan semakin tingginya angka kecelakaan terutama, pada pengguna sepeda motor.

Dalam kenyataannya kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang. Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari

kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas, baik karena faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karena itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karena faktor kondisi jalan harus mendapatkan perlindungan hukum.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Aturan-aturan hukum apakah yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan ?

## **BAB II**

### **KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas,

sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut.”<sup>2</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus di kembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.

## **2. Pengertian Jalan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah keseluruhan bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang ada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

---

<sup>2</sup> Subekti, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 74



pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung.

## **B. Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negaranya dalam Negara Hukum**

Menurut Thomas Hobbes (1588-1406) sebagaimana dikutip oleh Soehino negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.<sup>3</sup> Menurut J.J. Rousseau (1712-1778) Negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.<sup>4</sup>

Landasan Negara Hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintah. Asas-asas umum Negara hukum yang langsung berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah adalah:

1. Asas legalitas dalam pelaksanaannya pemerintah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan soal kewenangan, presedur, dan substansi.
2. Perlindungan hak asasi, yaitu masalah hak klasik dan soal sosial.<sup>5</sup>

## **C. Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penggunajalan**

<sup>3</sup> Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 3

<sup>4</sup> Ibid hlm 3

<sup>5</sup> Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 13

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan mencakup sebagai berikut:

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

1. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. menolong korban;
3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. mengolah tempat kejadian perkara;
5. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
6. mengamankan barang bukti; dan
7. melakukan penyidikan perkara

Pasal 238

- 1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 239

- 1) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 240 mengatur tentang hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu :

- a) Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau/pemerintah,
- b) Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c) Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

**D. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan**

Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban pengguna jalan yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak menurut AKBP Dadiyo, antara lain:

1. Kurangnya jumlah anggota kepolisian

Jumlah anggota kepolisian yang kurang banyak mengakibatkan kepolisian sulit untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Kepolisian hendaknya meningkatkan motivasinya untuk memecahkan permasalahan

lalu lintas yang terjadi. Misal kemampuan menganalisa lingkungan, kemampuan psikologi dari polisi untuk menganalisis jalan yang rusak

2. Fasilitas kepolisian dalam menunjang kerja aparat kepolisian yang kurang, misal kurangnya pos polisi sebagai sarana untuk melakukan penjagaan di malam hari menyebabkan sulitnya melakukan pertolongan kepada korban kecelakaan. Dengan adanya penambahan jumlah aparat kepolisian dan menambah pos-pos kepolisian yang bertugas 24 jam tentunya akan sangat membantu dalam proses penanganan hukum yang ada.
3. Kesadaran masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak masih rendah untuk mengajukan permintaan perlindungan hukum kepada pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh jalan yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Dadiyo Ditlantas Polda DIY, pada tanggal 15 April 2014

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan-aturan hukum yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan terdapat dalam: Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 227 ayat (1-5), Pasal 230, Pasal 234 ayat (1-2), Pasal 238 Pasal ayat (1-2), Pasal 239 ayat (1-2), dan pasal 240.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan adalah :
  - a. Kurangnya jumlah anggota kepolisian.
  - b. Fasilitas kepolisian dalam menunjang kerja aparat kepolisian yang kurang.
  - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah

## Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk lembaga kepolisian dan masyarakat sebagai berikut ;

1. Perlu adanya koordinasi antara polisi lalu lintas dengan Dinas Perhubungan dan aparat pemerintah lainnya dalam hal memperhatikan kondisi jalan. Jika terdapat jalan yang rusak dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas polisi segera melakukan pemberian tanda, dan melakukan penjagaan terhadap jalan yang mengalami kesurakan serta memberikan penerangan terhadap ruas-ruas jalan.
2. Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan agar meninjau kembali Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terutama yang berkaitan dengan perbaikan jalan, agar dapat terlaksana secara efektif untuk menekan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh jalan yang rusak, serta memberikan sanksi terhadap penyelenggara jalan yang tidak dengan cepat melakukan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- M. Karjadi, 1975, *Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeia, Bogor.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibramhim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (editor: Soerjono Soekanto) *inventarisasi dan analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV Rajawali Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *mengenai Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Soehino, *Hukum Tata Negara sistem Pemerintahan Negara*, Liberty Yogyakarta, 1993
- Soekanto soerjono, SH, MA, 1990, *Polisi dan lalu lintas*, cv.mandar maju, Bandung.
- Subekti, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.

### Peraturan Perundang Undang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Website :

- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/24/pan05.htm>. diakses tanggal 29 april 2014
- <http://tugas-softskill-rizka.blogspot.com/2011/01/warga-negara-negara-hukum-negara-dan.html>. Diakses tanggal 30 april 2014
- <http://hari-mardiansyah.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-negara-kepada-warga.html> diakses tanggal 28, april 2014

